

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA)

Cynthia Angelina¹, Janice², Christalia Clarina³, Wina Wirafanjaya⁴, Jesisca⁵

¹ Akuntansi, Universitas Prima Indonesia⁵Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, chynihiaangelinaa@gmail-com

^{2 3 4 5}Akuntansi, Universitas Prima Indonesia

Article Info:

Article history:

Received Date: DD/MM/YYYY
(for the author to fill in)

Accepted Date: DD/MM/YYYY
(for the officer to fill in)

Published Date: DD/MM/YYYY
(for the officer to fill in)

Keywords:

Economic Growth
Surplus of Budget Financing Local
Government Original Revenue
General Allocation Fund And
Capital Expenditure

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence about the effect of the Economic Growth, Surplus of Budget Financing, Local Government Original Revenue, General Allocation Fund on Capital Expenditure in the district/city in North Sumatera. The sample in this study wa 33 district/city in North Sumatera using purposive sampling method. Data analysis for this study uses multiple linear regression using t test, F test and coefficient of detemination. The partial test results of Surplus of Budget Financing, Local Government Original Revenue and General Allocation Fund have a significant effect on Capital Expenditure while the Economic Growth has no effect on Capital Expenditures. Economic Growth, Surplus of Budget Financing, Local Government Original Revenue, General Allocation Fund simultaneously effect on Capital Expenditure the district/city in North Sumatera.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Cynthia Angelina
Universitas Prima Indonesia
chynihiaangelinaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya undang-undang di Indonesia tentang otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan kewenangan besar dalam mengelola pemerintahan termasuk juga dalam pengelolaan keuangan masing-masing daerah tersebut. Semangat dari otonomi daerah ini juga diberikan agar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri, salah satunya adalah keleluasaan mencari sumber- sumber pendapatan dalam membiayai pengeluaran daerah itu sendiri.

Dikutip dari (Simorangkir, 2017), Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pengalokasian APBN ke daerah tidak mengikuti pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga anggaran yang dikirimkan ke daerah di setiap tahun makin meningkat. Mulai dari peluncuran program fiskal pada tahun 2000 sebesar Rp.81 triliun hingga saat ini telah mencapai Rp.766 triliun, dan alokasi anggaran belanja juga mengalami kenaikan sebesar 12 kali lipat dengan jumlah Rp.93 triliun hingga mencapai Rp.1.097 triliun. Artinya kenaikan belanja APBN dan kiriman anggaran ke daerah-daerah tidak mengikuti pengelolaan yang efektif dan efisien.Negara harus segera membuat transformasi pengelolaan keuangan negara karena pengelolaan APBN dan

APBD masih memiliki waktu untuk diperbaiki sehingga dapat lebih tepat dan benar. Hal ini terjadi karena meningkatnya belanja pegawai lebih tinggi dari limit belanja modal, simpanan pada bank yang makin meningkat setiap tahunnya dan peningkatan layanan publik negara. Contohnya di Balikpapan memiliki akses air bersih sebesar 98% sedangkan di Papua hanya terdapat 4% saja, di Aceh hanya mendapat 15 banding 100 ribu orang tenaga kesehatan dan di Kupang hanya 1,4 banding 100 ribu orang yang dilayani tenaga kesehatan. Lebih buruknya lagi terdapat 361 dari 542 kepada daerah yang terlibat kasus korupsi, diantaranya terdapat 18 gubernur, 343 bupati/walikota, jaringan korupsi terbesar yaitu pada pengadaan konstruksi bangunan.

Setelah dijalankannya undang-undang otonomi daerah selama 16 tahun, ternyata masih banyak daerah yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah daerah mengharapkan dana yang seimbang untuk membantu keuangan daerah karena kondisi keuangan daerah yang sangat bergantung dengan dana bantuan keuangan pusat. Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah dana transfer ke daerah sebagai bagian dari bantuan keuangan pusat ke daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini memang bisa saja diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja di daerah, tetapi jika dilihat dari semangat awal otonomi daerah, ketergantungan daerah kepada pusat sampai saat ini dalam hal pendanaan belanja daerah tidak lagi menjadi tujuan utama otonomi daerah.

Alokasi belanja modal di daerah akan dipengaruhi kenaikan ekonomi suatu daerah, jika kenaikan ekonomi stabil maka daya beli masyarakat juga baik sehingga pendapatan dari sektor pajak daerah ataupun retribusi daerah akan jauh lebih baik. Kenaikan ekonomi yang baik di suatu daerah akan menarik investor untuk menginvestasikan dananya yang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pajak dan retribusi serta perputaran modal di daerah tersebut yang akan menyebabkan *multiflier effect* terhadap ekonomi di daerah tersebut. Untuk itu setiap pemerintah daerah harus menjaga stabilitas ekonomi di daerahnya agar tingkat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat yang akan berakibat terhadap ekonomi di daerah tersebut.

Efek ganda yang disebabkan ekonomi yang meningkat akan menyebabkan masyarakat menggunakan penghasilan yang ada untuk belanja kepada pelaku-pelaku usaha dan dari belanja tersebut akan dikenakan pajak daerah, retribusi daerah dan bentuk-bentuk penghasilan lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pendapatan asli di daerah merupakan pendapatan murni dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dipenuhi daerah akan leluasa dalam mengelola belanja. Pendapatan daerah yang tinggi dapat menghindari ketergantungan daerah terhadap pusat melalui bantuan-bantuan keuangan pemerintah kota.

Salah satu bantuan keuangan pemerintah pusat ke daerah untuk mengatasi ketimpangan urusan pajak di daerah, agar daerah yang mendapatkan pendapatan daerah yang tinggi dapat mensubsidi daerah yang pendapatan daerahnya rendah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana alokasi umum dari pusat sampai sekarang masih sangat tinggi, sehingga pemerintah pusat mencari formula yang tepat dalam menghitung kebutuhan dana alokasi umum untuk daerah, agar tidak ada lagi daerah yang tidak maksimal dalam mencapai target pendapatan asli daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah secara khusus mengelola belanja, pemerintah daerah dalam mengelola belanja sering tidak efisien dan tidak efektif, sasaran belanja yang tidak terukur dan *outcome* yang tidak tercapai. Pengelolaan belanja yang tidak efisien dan efektif tersebut seringkali menyisakan banyak anggaran di akhir tahun. Perhitungan jumlah belanja yang tidak tepat, adanya markup harga, penyelesaian pekerjaan di akhir tahun yang tidak selesai atau bahkan penyusunan anggaran yang tidak berbasis kinerja menyebabkan anggaran yang berlebih di akhir tahun.

Sisa anggaran yang berlebih disebut sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA, anggaran ini dapat bermanfaat untuk tahun anggaran tahun selanjutnya tetapi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dianggarkan terlebih dahulu dalam akun belanja pembiayaan, tetapi APBD sering digunakan untuk keperluan pegawai dibandingkan belanja modal yang merupakan pembelanjaan yang dapat dialokasikan kepada masyarakat. SiLPA yang banyak juga mengindikasikan pengelolaan anggaran yang tidak baik dari pemerintah daerah tersebut, karena anggaran telah diatur sesuai kebutuhan pemerintah daerah untuk tahun anggaran tersebut. Hal ini juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa sumber yang telah menganalisis penelitian ini, maka kami memiliki keinginan untuk meneliti kembali jurnal yang berjudul: **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara)**

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Banyaknya sumber danadihasilkan daerah-daerah, dengan ini dapat meningkatnya penghasilan dari daerah-daerah yang seharusnya mengikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun daerah yang diberikan dalam berbagai bentuk untuk keperluan masyarakat. (Wertanti & A.A.N.B, 2013)

2.2 Teori Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD mempunyai pengaruh terhadap belanja modal terbukti ada perubahan pada pendapatan daerah yang mempengaruhi belanja modal. (Juniawan & Suryantini, 2018)

2.3 Teori Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dengan adanya dana alokasi umum, maka biaya belanja modal akan semakin tinggi dan akan memenuhi kebutuhan dasar layanan umum, sehingga pendapatan asli daerah akan memberikan kontribusi (dana) dengan jumlah yang besar terhadap pertambahan belanja modal (Ningsasra, 2016)

2.4 Teori Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Sisa lebih pembiayaan anggaran harus lebih mahir dalam meningkatkan pengadaan berbagai prasarana dan sarana yang dilakukan untuk kepentingan publik. SiLPA memiliki indikator yang membayangkan efesiensi pengeluaran pemerintah dan terbentuk jika mengalami kelebihan APBD. Jika biaya netto positif, maka pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Kusumawardani, 2018)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan kuantitatif sebagai pendekatan penelitian, diartikan sebagai filsafat positivisme, bertujuan untuk meneliti populasi, *sample*, serta data yang bersifat *statistic* dapat menguji variabel yang sudah ditentukan. Sedangkan jenis penelitian menggunakan deskriptif, diartikan sebagai penelitian yang bukan membandingkan satu variabel dengan sampel melainkan mencari hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. (Sugiyono, 2012)

3.2 Populasi

Populasi penelitian diambil dari tahun 2014-2017 dengan mengambil laporan keuangan APBD sejumlah 33 Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.

3.3 Sampel

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 33 Kota / Kabupaten dengan perhitungan 33×4 Periode (laporan tahunan) sehingga diperoleh sebanyak 132 data.

3.4 Identifikasi Penelitian

Dari penelitian ini terdapat 1 variabel terikat, belanja modal (Y) serta Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3) & Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X4) merupakan 4 variabel bebas.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis ini menggunakan regresi linear berganda dengan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heterokedasitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis dilakukan koefisien determinasi (R²), simultan (F) dan parsial (t)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini data berjumlah 33 kota/kabupaten di Sumatera Utara dimana selama 4 periode yaitu tahun 2014 sampai tahun 2017 dengan jumlah 132 data. Berikut hasil olah data dari sampel dilihat dari statistik deskriptif yaitu:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	132	4.11	7.67	5.2850	.55534
PAD	132	10298059000	1739756924000	128854383717.54	270795434464.637
DAU	132	250589805000	1611940995000	618239734080.01	287646845992.010
SILPA	132	-64357000	376281581501	87741801629.97	66748236983.589
BM	132	45065315458	997475993000	246097268803.50	157052497288.845
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Nilai min Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,11 yang diperoleh Kabupaten Batubara pada tahun 2015 dan tahun 2017. Nilai maks Pertumbuhan Ekonomi memperoleh nilai 7,67 yang diperoleh Kabupaten Deli Serdang di tahun 2014. Nilai keseluruhannya 5,2850 dan standar deviasinya 0,55534.

Nilai min Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10.298.059.000 yang diperoleh Kabupaten Nias Barat di tahun 2014. Nilai maks Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp1.739.756.924.000 yang diperoleh Kota Medan pada tahun 2017. Nilai keseluruhannya Rp128.854.383.717,54 dan standar deviasinya Rp270.795.434.464,637.

Nilai min Dana Alokasi Umum sebesar Rp250.589.805.000 yang diperoleh Kabupaten Nias di tahun 2016. Nilai maks Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp1.611.940.995.000 yang diperoleh kota Medan di tahun 2015. Nilai keseluruhannya Rp618.239.734.080,01 dan standar deviasinya Rp287.646.845.992,010.

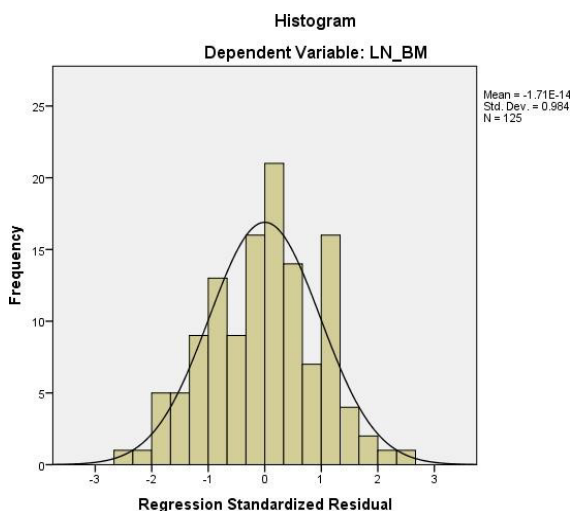
Nilai min Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar minus Rp64.357.000 yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan di tahun 2016. Nilai maks Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar Rp376.281.581.501 yang diperoleh kota Medan di tahun 2015. Nilai keseluruhannya Rp87.741.801.629,97 dan standar deviasinya Rp66.748.236.983,589.

Nilai min Belanja Modal adalah sebesar Rp45.065.315.458 yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan di tahun 2016. Nilai maks Belanja Modal adalah sebesar Rp997.475.993.000 yang diperoleh kota Medan di tahun 2017. Nilai keseluruhannya Rp246.097.268.803,50 dan standar deviasinya Rp157.052.497.288,845

4.1 Uji Normalitas

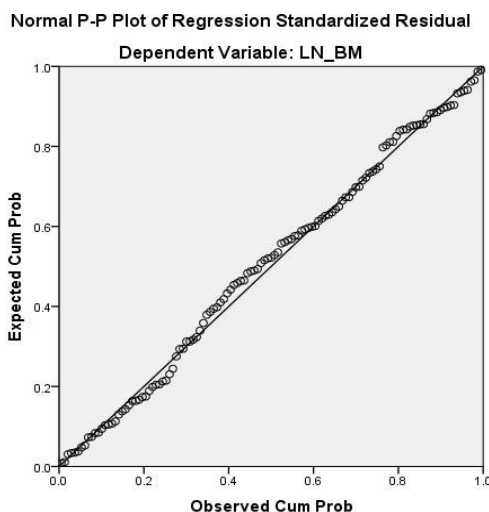
Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variable pengganggu mempunyai distribusi normal dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

4.2 Analisis Grafik



Gambar 1. Uji Normalitas Histogram

Berdasarkan Gambar 1, hasil residual data telah menunjukkan residual data telah menunjukkan data berdistribusi normal karena kurva normal membentuk lonceng sempurna serta sebagian besar data telah berada di dalam kurva normal.



Gambar 2. Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan Gambar 2, hasil menyerupai titik yang berdekatan pada garis diagonal, dikatakan data terdistribusi normal. Untuk itu harus melakukan analisis secara statistic untuk mengetahui apakah data tersebut benar-benar telah bersifat normal.

4.3 Analisis Statistik

Uji yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik *Kolmogrov-smirnov*. Dimana jika nilai sig > 0.05 berarti data bersifat normal sedangkan nilai sig < 0.05 berarti tidak normal.

Tabel 2. Uji Normalitas *Kolmogrov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.29410290
	Absolute	.045
Most Extreme Differences	Positive	.045
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.502
Asymp. Sig. (2-tailed)		.962

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada Tabel 2, hasil nilai sig 0,962 > 0.05 dan disimpulkan Kolmogrov Smirnov telah berdistribusi normal.

4.4 Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen. Jika regresi tersebut bagus maka tidak akan terjadi korelasi antara variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LN_PE	1.000	1.000
LN_PAD	.376	2.663
LN_DAU	.363	2.757
LN_SILPA	.919	1.088

a. Dependent Variable: LN_BM

Nilai *tolerance* untuk variabel PE sebesar 1,000 , PAD sebesar 0,376 , DAU sebesar 0,363 dan SILPA sebesar

0,919 berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* lebih besar 0,10 sedangkan nilai VIF variabel PE sebesar 1,000 , PAD sebesar 2,663 , DAU sebesar 2,757 , SILPA sebesar 1,088 berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF berada di bawah atau lebih kecil dari 10. Kesimpulannya variabel seluruh variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

4.5 Uji Autokorelasi

Uji ini menggunakan *Durbin-watson*, jika data tidak terjadi autokorelasi maka data tersebut bersifat normal.

Tabel 4. Uji Korelasi

Model	<i>Durbin-Watson</i>
1	2.113

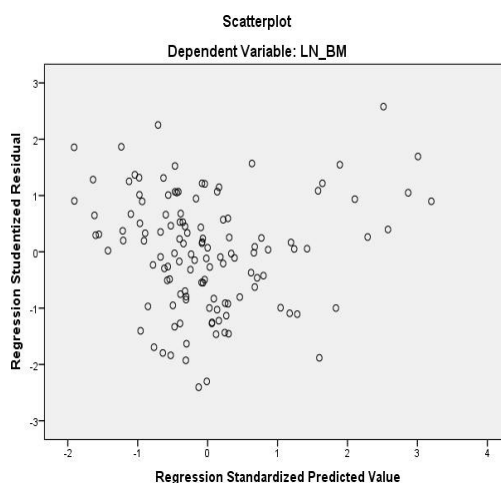
a. *Predictors:* (Constant), LN_SILPA, LN_PE, LN_PAD, LN_DAU

b. *Dependent Variable:* LN_BM

Nilai *Durbin-Watson* menunjukkan nilai sebesar 2,113; pengambilan keputusan DW adalah $du < dw < 4-du$. Sampel penelitian $n = 132$, maka nilai $dl = 1,6539$ dan $du = 1,7786$. Hasilnya $du < dw < 4-du$ adalah $1,7786 < 2,113 < (4 - 1,7786)$, maka $1,7786 < 2,113 < 2,2214$ disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Data yang bagus dan normal tidak akan mengalami heteroskedastisitas. Untuk mengukut apakah data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan varian *error terms*. Penelitian menggunakan metode *chart* (*Diagram Scatterplot*) yang jika titik berbentuk pola maka terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika titik menyebar diatas dan dibawah maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3, hasilnya titik menyebar tidak beraturan tersebar ke atas dan bawah tidak terkumpul di satu tempat, disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Glejser

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.816	1.330		.614	.541
LN_PE	-.004	.157	-.003	-.028	.977
LN_PAD	.038	.029	.197	1.345	.181
LN_DAU	-.029	.067	-.065	-.436	.663
LN_SILPA	-.030	.023	-.123	-1.307	.194

a. *Dependent Variable:* ABS_RES2

Pada Tabel 5, nilai signifikan PE (Pertumbuhan Ekonomi), PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum) dan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) berada di atas 0,05 disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4.7 Hasil Analisis Data Penelitian

Model Penelitian

Pengujian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan adalah:

Tabel 6. Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	62805422404.511	56461921482.994		1.112	.268
Pertumbuhan Ekonomi	331445040.727	10312874942.168	.001	.032	.974
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	.310	.091	.132	3.400	.001
Pendapatan Asli Daerah	.343	.030	.592	11.325	.000
Dana Alokasi Umum	.178	.029	.326	6.198	.000

a. *Dependent Variable:* Belanja Modal

Belanja Modal = 62805422404.511 + 331445040.727 Pertumbuhan Ekonomi + 0,310 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran + 0,343 Pendapatan Asli Daerah + 0,178 Dana Alokasi Umum

1. Nilai (a) menunjukkan apabila variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum bernilai konsta, maka nilai belanja modal sebesar = 62805422404.511
2. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi jika mengalami kenaikan sebesar satu, maka belanja modal mengalami kenaikan sejumlah 331445040.727.
3. Koefisien regresi sisa lebih perhitungan jika mengalami kenaikan anggaran sebesar satu, maka belanja modal mengalami kenaikan sejumlah 0,310.
4. Koefisien regresi pendapatan asli daerah jika mengalami kenaikan sebesar satu, maka belanja modal mengalami kenaikan sejumlah 0,343.
5. Koefisien regresi dana alokasi umum jika mengalami kenaikan sebesar satu, maka belanja modal mengalami kenaikan sejumlah 0,178.

4.8 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan untuk menerangkan variabel (Y). Jika mendekati 1, dikatakan kemampuan variabel independen lebih besar daripada variabel dependen.

Tabel 7. Uji Koefisien Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 ^a	.840	.834	63893857934.04992	2.249

Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah

Dependent Variable: Belanja Modal

Pada Tabel 7 nilai *Adjusted R²* adalah 0,834. Variabel independen sebesar 83,4% dipengaruhi Belanja Modal (Y) sisanya sebesar (100% - 83,4% = 16,6%) merupakan variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.9 Pengujian Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel (x) memiliki pengaruh secara keseluruhan pada variabel (y).

Tabel 8. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2712710799134928700000000.000	4	678177699783732200000000.000	166.121	.000 ^b
Residual	518467985375462400000000.000	127	4082425081696554000000.000		
Total	3231178784510391000000000.000	131			

a. *Dependent Variable:* Belanja Modal

b. *Predictors:* (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 8 diatas maka disimpulkan nilai Fhitung sebesar 166,121.

Maka hasilnya adalah Fhitung 166,121 > Ftabel 2,70 dengan signifikan 0,000. Karena Fhitung > Ftabel dan

signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.

4.10. Pengujian Parsial (Uji T)

Uji ini menunjukkan bahwa seberapa pengaruhnya variabel (x) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 9. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	62805422404.511	56461921482.994		1.112	.268
Pertumbuhan Ekonomi	331445040.727	10312874942.168	.001	.032	.974
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	.310	.091	.132	3.400	.001
Pendapatan Asli Daerah	.343	.030	.592	11.325	.000
Dana Alokasi Umum	.178	.029	.326	6.198	.000

a. *Dependent Variable:* Belanja Modal

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi $0,032 < t$ tabel 2,03452 , nilai sig $0,974 > 0,05$ maka H_0 diterima artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.
2. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran $3,400 > t$ tabel 2,03452 , nilai sig $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah $11,325 > t$ tabel 2,03452 , nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.
4. Variabel Dana Alokasi Umum $6,198 > t$ tabel 2,03452 , nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.

4.11. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian dihasilkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai thitung $<$ nilai ttabel dengan signifikan lebih besar dari 0.05. Sejalan pendapat (Nova, 2017), dikarenakan pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal pada APBD untuk menambah aset tetap. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus mengubah komposisi belanjanya, karena selama ini kurang produktif dalam belanja rutinnya.

Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena nilai thitung $>$ nilai ttabel dengan signifikan < 0.05 . Sejalan pendapat (Engkos, 2017) dan (Mahmudi, 2010), bahwa “apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan hangus, tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam SiLPa”

Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena nilai thitung $>$ nilai ttabel dengan signifikan < 0.05 . Sejalan pendapat (Saptaningsih, 2009), karena Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan diperoleh melalui daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh pada Belanja Modal, karena nilai thitung $>$ nilai ttabel dengan signifikan < 0.05 . Sejalan pendapat (Pradita, 2013), yang mengemukakan bahwa jika Dana Alokasi Umum diterima daerah dengan tinggi, maka belanja modal yang dibelanjakan juga akan tinggi.

5. KESIMPULAN

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh Belanja Modal
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memiliki pengaruh dan signifikan pada Belanja Modal
3. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh dan signifikan pada Belanja Modal

4. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh dan signifikan pada Belanja Modal

6. SARAN

Dilakukannya penelitian agar mengetahui pengaruh variabel (x) terhadap (y). Hasilnya terdapat 1 variabel (x) tidak berpengaruh yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Bagi pemerintah kota dan kabupaten, agar terus meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena pengaruhnya sangat mempengaruhi Belanja Modal. Bagi akademisi untuk menambah variabel lain dalam melakukan penelitian yang sejenis atau menggunakan variabel moderasi

7. REFERENSI

- Engkos, K. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar. *Jurnal Universitas Galuh Ciamis*, 13-32.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Unud*, 1255-1281.
- Kusumawardani, I. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DAK, SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2010-2015. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ningsasra, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kab/Kota Sumatera bagian Tengah tahun 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Nova, R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Pradita, R. R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- Saptaningsih, S. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmenipa UPY*.
- Simorangkir, E. (2017, November 22). *detik finance*. Retrieved November 22, 2017, from detikcom: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3737927/kemenkeu-pengelolaan-anggaran-di-daerah-belum-efektif>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wertanti, I. G., & A.A.N.B, D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai model moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 567